

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan. Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di daerahnya. Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah masing-masing agar terjadi kesinambungan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri pada khususnya, dan Negara Indonesia pada umumnya, untuk itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun pembangunan nasional. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Merupakan tugas yang berat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga diperlukan tenaga ekstra dan perhatian serius, baik dari pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah karena pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan di daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur guna menggerakkan perekonomian daerah yaitu dengan melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini dituntut untuk dapat menetapkan

sumber pendapatan potensial dan mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun dengan melakukan alokasi belanja berdasarkan pilihan prioritas yang tepat, terutama dari pajak dan retribusi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di ungkapkan pengertian pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut: Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Pajak dan retribusi daerah merupakan dua komponen yang paling penting dalam menentukan pendapatan asli daerah. Maka dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus mampu menghimpun potensi pendapatan daerah, khususnya dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan kapasitas dan efisiensi sumber pendapatan. Berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur:

Tabel 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	52.031.820.000,00	47.561.063.030,01
2016	53.825.738.100.00	50.183.797..223,36
2017	90.212.914.900.00	81.728.522.104,60

Sumber : Dinas Badan Keuangan Daerah, 2019

Data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi PAD Kabupaten flores Timur dari tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi dan belum mencapai target. Jumlah PAD Kabupaten Flotim dari tahun 2015 -2017

merupakan sumbangan dari jumlah Pajak dan retribusi daerah. Sumbangan Pajak daerah dan retribusi daerah di tahun 2015 untuk PAD adalah sebesar 16,7 % dan 41,6 % di tahun 2016. Sumbangan Pajak daerah dan retribusi daerah untuk PAD adalah sebesar 19,2 % dan 40,5%, sumbangan Pajak daerah dan retribusi daerah di tahun 2017 untuk PAD adalah sebesar 13,5 % dan 24,7%. Dengan demikian, berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Analisis Potensi Dan Realisasi Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Realisasi Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Flores Timur?
2. Bagaimana Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Pajak daerah di Kabupaten Flores Timur?
3. Apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah di Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Realisasi Pemungutan Pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Flores Timur

2. Untuk Mengetahui Potensi Pajak daerah dan Retribusi Pajak daerah di Kabupaten Flores Timur
3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah di Kabupaten flores Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dimasa yang akan datang untuk lebih mengoptimalkan Potensi dan Realisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah di kabupaten Flores timur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang Potensi dan Realisasi Pajak dan Retribusi daerah di kabupaten Flores timur.